

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI

by Zega Samahati

Submission date: 30-Jan-2024 04:25AM (UTC-0500)

Submission ID: 2281974436

File name: SAMAHATI_ZEGA_1.docx (195.17K)

Word count: 13025

Character count: 86145

**UNIVERSITAS
NIAS**



UNIAS

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ⁹ BAGI WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

Oleh:
SAMAHATI ZEGA
NIM. 192119043



**UNIVERSITAS NIAS (UNIAS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKN)
JANUARI 2024**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Nias (UNIAS)
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan**

**Oleh:
SAMAHATI ZEGA
NIM. 192119043**

**UNIVERSITAS NIAS (UNIAS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKN)
JANUARI 2024**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA GUNUNGSITOLI**

Oleh:
Samahati Zega
NIM 192119043

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Implementasi pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, (2) meneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan karakter, dan (3) mengetahui upaya dari hambatan pelaksanaan pendidikan karakter.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah: (1) pelaksanaan pendidikan karakter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan. pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, (2) faktor pendukungnya adalah warga binaan taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; kebijakan wajib diikuti warga binaan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi sebagian warga binaan; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran sempit, dan (3) solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan sanksi dimasukkan ke selker; memotivasi warga binaan; mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Warga Binaan

KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat pertolonganNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Judul skripsi yang telah peneliti rumuskan adalah: “*Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli*”. Peneliti menyadari di dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, akan tetapi peneliti memperoleh bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ellyunus Waruwu, S.Pt., M.Si sebagai Rektor Universitas Nias.
2. Bapak Dr. Yaredi Waruwu, S.S., M.S sebagai Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
3. Bapak Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H sebagai Plt. Ketua Program Studi PPKn.
4. Bapak Armstrong Harefa, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi peneliti sehingga pembuatan skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
5. Bapak KALAPAS Kelas II B Kota Gunungsitoli yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpin.
4. Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias khususnya di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

7. Kepada Orangtua tercinta yang senantiasa mendukung serta memberikan dorongan maupun motivasi serta doa kepada peneliti baik dari segi materil dan moril sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada keluarga, dan saudara/i yang telah mendukung serta mendoakan peneliti dalam pembuatan skripsi ini sehingga selesai tepat waktunya.
9. Kepada Grace Telaumbanua orang yang telah menemani, mendoakan serta memberi dukungan terbaik dan waktunya untuk senantiasa memotivasi peneliti sehingga skripsi ini selesai tepat waktunya.
10. Dan rekan-rekan mahasiswa khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 secara khusus dan secara umum kepada seluruh mahasiswa Universitas Nias.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kiranya Tuhan yang membalas kepada Bapak/Ibu dan saudara/i semua, Ya'ahowu.

Gunungsitoli, 17 Januari 2024

Peneliti

Samahati Zega

NIM. 192119043

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pendidikan Karakter	7
2.1.1 Pengertian Pendidikan.....	7
2.1.2 Pengertian Karakter.....	8
2.1.3 Pengertian Pendidikan Karakter.....	9
2.1.4 Tujuan Pendidikan Karakter	9
2.1.5 Nilai-nilai Pendidikan Karakter	12
2.2 Pengertian Warga Binaan (narapidana).....	13
2.2.1 Kewajiban Warga Binaan(narapidana)	14
2.3 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	15
2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
2.3.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
3.2 Variabel Penelitian	18
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	19
3.4 Sumber Data	21
3.5 Instrumen Penelitian	21

3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Paparan Data	26
4.2 Hasil Penelitian	33
4.3 Pembahasan	41
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat	51
4.5 Solusi Dari Hambatan Implementasi Pendidikan Karakter	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Waktu dan Jadwal Penelitian	20
2. Daftar Urut Pegawai LAPAS Kelas II B Kota Gunungsitoli	27
2. Jumlah Warga Binaan	32
3. Keadaan Sarana dan Prasarana	32

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Bagan Teknik Pengumpulan Data	23
2. Bagan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ada banyak suku, ras, bahasa, dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Individu adalah individu yang mempunyai pilihan, kesempatan dan kewajiban dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai pengganti negara harus mempunyai pilihan untuk memahami tujuan publik Indonesia. Dalam mengakui tujuan publik, individu dengan etika, kehebatan dan kualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengakuan terhadap individu yang mempunyai etika, kualitas dan kehebatan diperoleh secara positif dari pengajaran. Salah satu sarana untuk mengembangkan potensi diri adalah dengan pendidikan. Pendidikan yang menyeluruh akan membawa dan mengkoordinasikan masyarakat menuju masa depan yang layak pula. Pendidikan diharapkan mampu membina manusia dalam diri manusia. Abdullah Munir (2010: XII) mengungkapkan bahwa “karakter adalah kesepakatan dua sisi. Setiap karakter mempunyai dua sisi yang saling bersaing.” Anak-anak yang memiliki kepastian tinggi akan memiliki dua potensi hasil yang berbeda dan bertentangan. Peluang utamanya adalah berkembangnya ketabahan karena rasa percaya diri. Sementara itu, munculnya kecerobohan dan kurang perhitungan akibat terlalu percaya diri terhadap kemampuan atau perhitungan merupakan kemungkinan kedua.

Saat ini, pelatihan karakter sedang digencarkan di Indonesia. Pendidikan karakter dipandang sebagai bekal untuk mengembangkan dan menggarap sikap masyarakat Indonesia. Menurut Zubaedi (2011:16), pemikiran Raharjo sejalan dengan hal berikut:

Pendidikan karakter suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembinaan karakter melalui pengajaran sesungguhnya merupakan pembinaan yang menanamkan nilai-nilai, mentalitas dan sifat-sifat serta standar-standar kepada diri manusia sejak masa remaja. Setiap individu akan mendapatkan pelatihan yang belum pernah ada sebelumnya untuk iklim keluarga. Keluarga merupakan hal yang krusial bagi perkembangan kepribadian seseorang. Peningkatan karakter dapat diartikan sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan dalam berpikir dan membentuk mentalitas. “Peningkatan karakter bukan hanya sekedar proses penyampaian informasi, namun pendidikan karakter juga memerlukan proses menampilkan pekerjaan dan asimilasi dalam iklim individu, lokal, keluarga dan iklim komunikasi luas” (Zubaedi, 2011: 17).

Seseorang menerima pendidikan pertamanya dari keluarganya. Peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman moral serta nilai-nilai tercermin dari cara anak bertindak, bertindak, dan berperilaku. Meski begitu, keluarga bukanlah landasan utama dalam membentuk watak dan watak seseorang. Pengaruh lingkungan, pergaulan, dan media seseorang dapat menyebabkan kepribadian seseorang yang mendarah daging berubah.

Membangun karakter suatu bangsa merupakan salah satu komponen terpentingnya. Pokoknya saat ini di Indonesia ada yang darurat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aksi unjuk rasa yang menyimpang dan korup di ruang publik. Episode-episode ini mencakup penghinaan, pembunuhan, perampokan, perkelahian, penyerangan dan banyak kasus tidak senonoh lainnya.

Secara umum lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang mendidik warga binaan selama berada di dalam tahanan agar dapat meningkatkan diri. Mengajar merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kapasitas diri yang sebenarnya. Masyarakat akan memperoleh manfaat akibat pembangunan yang baik pula. Untuk membantu seseorang mengembangkan karakternya, diperlukan pembinaan. Pengembangan karakter sebenarnya adalah pendidikan yang mengajarkan nilai,

sikap, sifat, dan norma kepada masyarakat sejak dini. Setiap individu akan mendapatkan pelatihan yang belum pernah ada sebelumnya untuk iklim keluarga. Keluarga merupakan hal yang krusial bagi perkembangan kepribadian seseorang. Tujuan pengembangan karakter adalah untuk menanamkan kecerdasan berpikir dan membentuk sikap.

Membangun karakter suatu bangsa merupakan salah satu komponen terpentingnya. Pokoknya saat ini di Indonesia ada yang darurat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aksi unjuk rasa yang menyimpang dan korup di ruang publik. Episode-episode ini mencakup penghinaan, pembunuhan, perampokan, perkelahian, penyerangan dan banyak kasus tidak senonoh lainnya.

Demonstrasi pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah globalisasi. Masyarakat Indonesia sangat terkena dampak globalisasi. Individu yang tidak bisa memilih dan memilah arus globalisasi akan tersapu oleh arus buruk. "Hal ini terjadi karena globalisasi telah membawa kita pada perubahan-perubahan yang bersifat material sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan tradisi budaya masyarakat," tegas Masnur Muslich (2004:1).

Era globalisasi modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia. Ketidakmampuan masyarakat untuk merespons secara akurat perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut dapat menjadikan individu melakukan penyimpangan sosial. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perkara pidana yang merupakan indikasi penyimpangan sosial merupakan wujud dari krisis karakter bangsa.

Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Unsur-unsur penyimpangan sosial antara lain faktor keluarga, faktor alam, faktor teman sebaya, komunikasi yang luas, kegagalan dalam menjalankan kebiasaan yang lazim dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini diperkuat dengan proklamasi Susanto selaku Hakim Komisi Keamanan Remaja Indonesia (KPAI) kepada Gresnews.com, Kamis 9 Oktober 2014 yang berbunyi:

Baik sebagai pelaku maupun korban, berbagai kejahatan dan perbuatan yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh. Anak-anak sebagai pelaku perbuatan salah lebih banyak terkena dampak dari variabel ekologi yang tidak bersahabat, dampak media atau perlakuan teman-teman disekitarnya. Unsur alam inilah yang sedikit demi sedikit akan menggugah generasi muda untuk bercermin. Acara TV yang berisi hiburan seksual dan permainan kasar juga berdampak pada perilaku anak muda. Anak-anak muda bertindak sejauh yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan.

Selama ini kita sering melihat demonstrasi-demonstrasi kriminal terjadi di Indonesia, dimana oknum-oknum Indonesia banyak melakukan pelanggaran hukum. Individu yang berbuat salah adalah individu yang menyalahgunakan peraturan dan ketentuan negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat tentu akan mendapatkan pendisiplinan yang layak. Indonesia sebagai negara hukum dan ketertiban mempunyai aturan yang jelas terhadap tindak pidana demonstrasi dan pelanggaran hukum. Di dalam hukum ada macam-macam kesalahan, lamanya hukuman, perlakuan yang sah, kebebasan dan komitmen penjahat, dan lain-lain.

Bagi yang terbukti melanggar hukum akan dikenakan hukuman penjara. Dia menyandang gelar tahanan. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Ganti Rugi, "terpidana adalah terpidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dengan landasan pemulihan". Lembaga pemasyarakatan secara otomatis akan menampung narapidana yang telah dijatuhi hukuman. Hak dan tanggung jawab narapidana sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dilindungi oleh sistem pemasyarakatan yang sah.

Pelatihan yang didapat para tahanan terkesan seperti menginstruksikan dan membina. Hal ini jelas tertuang dalam Pedoman Pemerintahan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pergantian Acara dan Petunjuk Pemasyarakatan Remedial. Strategi ini diubah menjadi program peningkatan karakter dan pengarahan kebebasan. Salah satu cara untuk meningkatkan semangat narapidana selama berada di penjara adalah melalui kebijakan

pembinaan dan pendampingan. Diharapkan para narapidana menjadi lebih bermoral melalui pendampingan dan pembinaan.

¹ Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Provinsi Sumatera Utara memiliki lembaga pemasyarakatan dan Rutan/Cab. Rutan sebanyak 37 Unit, terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan dan 20 Rutan/Cab. Salah satu Lembaga pemasyarakatan yang besar di Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki luas 7.500 m² dengan kapasitas hunian 181 orang. Dan saat ini dihuni 235 orang Narapidana.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, bahwa keadaan di dalam Lembaga Pemasayakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sangat baik, terbukti Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai pembinaan terhadap Narapidana. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak diperbolehkan melakukan apapun. Seorang narapidana memiliki hak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan. Selama tinggal di lembaga restoratif, para tahanan dapat mengembangkan potensinya melalui sekolah yang dirujuk.

Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dengan memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menjadikan pembinaan ¹ bagi narapidana sebagai sarana untuk memberikan narapidana pendidikan karakter. Setiap narapidana memiliki karakter, kepribadian, watak dan minat serta bakat yang berbeda. Namun demikian, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak luput dari beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Implementasi Pembinaan**

Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian diarahakan pada “Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.”

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
3. Untuk Mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

1.5 Kegunaan hasil penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hal manfaat yang ingin dicapai setelah

dilaksanakan penelitian. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Umum

- a) Memberikan informasi dan gambaran bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b) Sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah dengan objek penelitian yang berbeda.

2. Secara Khusus

- a) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam meningkatkan pembinaan karakter bagi narapidana.
- b) Bagi pegawai lembaga pemasyarakatan, hasil ¹penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
- c) Bagi peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta memberikan wawasan kepada peneliti mengenai kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang diimplementasikan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembinaan Karakter

2.1.1 Pengertian Pembinaan

Menurut KBBI Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. ¹ Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013: 290) adalah “sekumpulan nilai yang muncul dalam kerangka kekuatan yang bertarung dan menjadi alasan pemikiran, cara pandang, dan perilaku seseorang”. Hal senada juga ¹ dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alamiah individu yang menjawab keadaan secara etis dan diwujudkan dalam kegiatan yang sungguh-sungguh melalui tingkah laku dan nilai-nilai orang lain terhadap orang lain”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemajuan Tahanan Restoratif dan PP RI Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara penegakan hak narapidana. Pasal 1 menyatakan bahwa “majuan adalah suatu tindakan untuk menggarap sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakal, berwawasan dan berperilaku, cakap, jasmani dan kesejahteraan yang mendalam bagi para tahanan dan peserta didik remedial”. Pembina dan pengawas pemsarakatan bertugas melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Pembinaan narapidana dan peserta didik pemsarakatan di lembaga pemsarakatan menjadi tanggung jawab pengawas pemsarakatan yang merupakan petugas pemsarakatan. Sedangkan Community Counselor ¹ adalah petugas pemsarakatan yang memberikan bimbingan klien di BAPAS.

² Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Adanya pembinaan membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya, sikap orang tersebut dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Menurut Thoha (2008:7) :

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan.

Jadi Pembinaan adalah suatu proses dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya pada Lapas untuk menuntun para terpidana kearah perbaikan dan re-integrasi sehat dengan masyarakat agar terpidana dapat diterima kembali.

Menurut Dwidja Priyatno (2006:106)

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a) Pengayoman. b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. c) Pendidikan. d) Pembimbingan. e) Penghormatan harkat dan martabat manusia. f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas dapat dilakukan secara intramural maupun ektramural. Pembinaan secara intramural ini merupakan pembinaan yang dilakukan didalam Lapas, sedangkan pembinaan secara ekstemural merupakan pembinaan diluar Lapas. Pembinaan secara intramural yang dilakukan didalam Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh lapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas (Widja

Priyatno, 2006:108).

“Program pembinaan dan pendampingan ditujukan kepada narapidana dan siswa pemasyarakatan,” bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan. Pendidikan yang ¹ diberikan kepada tahanan dan siswa remedial melalui pelatihan dan bimbingan yang meliputi pembinaan karakter dan otonomi serta latihan pembinaan. Menurut Pasal 3, pengembangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Komitmen kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
- b) Perhatian masyarakat dan negara
- c) Ilmiah
- d) Mentalitas dan perilaku
- e) Kesejahteraan fisik dan dunia lain
- f) Perhatian yang sah
- g) Reintegrasi yang baik dengan masyarakat
- h) Kemampuan pekerjaan
- I) Persiapan karya dan kreasi

² 2.1.2 Pengertian Karakter

Karakter adalah sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab (Erie Sudewo 2011:14). Hal ini sejalan dengan pendapat Khan (2010:1) menuliskan “karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan” sehingga pendidikan karakter menurut Khan adalah mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku guna membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian disisi lain ¹ deskripsi karakter yang juga dijelaskan oleh Muchlas Samani dan Hariyanto (2013:41) adalah:

Cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.

Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013: 290) adalah “sekumpulan nilai yang muncul dalam kerangka kekuatan yang bertarung dan menjadi alasan pemikiran, cara pandang, dan perilaku seseorang”. Hal senada juga ¹ dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alamiah individu yang menjawab keadaan secara etis dan diwujudkan dalam kegiatan yang sungguh-sungguh melalui tingkah laku dan nilai-nilai orang lain terhadap orang lain”.

Thomas Lickona menulis, “Karakter adalah sifat alamiah seseorang dalam memahami suatu keadaan secara moral” dalam Agus Wibowo (2012:32). Berbeda dengan penilaian ¹ di atas, Dharma Kesuma, dkk (2013:11) menggambarkan “karakter sebagai suatu nilai yang diwujudkan sebagai cara berperilaku anak”. ¹ Berdasarkan pengertian para ahli dalam mengartikan karakter ¹ di atas, maka cenderung beralasan bahwa karakter merupakan kualitas yang melekat pada diri seseorang sejak lahir dan dibentuk oleh iklim umum.

Sasaran dalam pembinaan karakter di lembaga masyarakat ini adalah tidak lain dari Narapidana itu sendiri. Tujuannya adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota

masyarakat. Kepala lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang tanggung jawabnya meliputi pendidikan dan kebudayaan, serta organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

Kemudian sebagaimana dimaknai dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pergantian Peristiwa dan Pengarahan Tahanan Restoratif, “dalam pelaksanaan pengarahan, pengaturan tahanan di lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting”. Sesuai Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Ganti Rugi, Pasal 12 menyatakan bahwa “dalam hal pembinaan tahanan di lembaga pemasyarakatan dilakukan pengelompokan berdasarkan: A. Usia; B. Jenis kelamin; C. Panjang kalimat; D. Jenis kejahatan; e. Kriteria lainnya sejalan dengan kebutuhan atau kemajuan pembinaan.”

Pelatihan menurut Organisasi Peningkatan dan Peningkatan Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, mengajar adalah suatu interaksi, strategi, usaha dan gerakan yang dilakukan secara produktif dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan bimbingan belajar adalah suatu pekerjaan atau metode pemberian arahan.

Melalui penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa pembentukan karakter adalah suatu upaya dan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengubah seseorang atau mengerjakan sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Sementara itu, bimbingan belajar adalah sebuah pekerjaan, suatu pendekatan untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat.

2.2 Narapidana

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Rektifikasi, pasal 1 angka 7 disebutkan, terpidana adalah terpidana yang sedang melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan dalam suatu organisasi pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan kebebasannya, hak-hak narapidana masih dilindungi dalam sistem penjara di Indonesia.

Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS dalam Sudarto (1986:27) :

Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut (Drs. Ac Sanoesi HAS1992, sistem pemasyarakatan Indonesia) :

Istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakatan disebut bahwa “para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas :

1. Narapidana
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana”.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, seorang narapidana memiliki hak melakukan:

1. Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
7. Mendapatkan bayaran atau kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
8. Mendapat kunjungan dari keluarga, bimbingan sah, atau lainnya
9. Remisi atau pengurangan hukuman pidana adalah

10. Mendapatkan kesempatan istirahat yang sangat dibutuhkan untuk bertemu keluarga
11. Dapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti sebelum diantar; juga, dapatkan kebebasan yang berbeda sesuai peraturan dan pedoman terkait.

Melalui penjelasan di atas, cenderung ada anggapan bahwa tahanan adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara dan kehilangan kesempatan tampil di muka umum karena pelanggaran hukum yang dilakukannya. Meski seorang tahanan tidak bisa hidup bebas di hadapan publik, ia sebenarnya mempunyai keistimewaan.

13. Kewajiban Narapidana

seorang narapidana yang sedang mengalami suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, yakni :

- a) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus dalam masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian,

dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas diantara penghuni di dalam lapas.

- i) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

2.3 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan,” demikianlah pengertian lembaga pemasyarakatan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah Kerangka Remedial menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah “permohonan mengenai arah dan titik batas serta strategi pembinaan tahanan dalam pandangan Pancasila yang dilakukan secara terkoordinasi antara pembimbing, yang diberi pengarahan dan daerah setempat untuk memperbaiki sifat para narapidana agar mereka mengetahui kesalahan-kesalahan, memperbaiki diri sendiri, dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang berulang-ulang sehingga dapat diakui kembali oleh masyarakat dan dapat melanjutkan kehidupan biasa sebagai penduduk yang baik dan cakap.”

Sebelumnya pemasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan atau pidana pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang memegang peran penting selama beberapa abad terakhir ini yang lazim disebut pidana penjara. Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi wanita tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi hanya ada di Batavia, terkenal

dengan Spinhuis dan Rasphuis.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

² 2.3.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan (Mardjono R.1984 Hal.84) sedangkan tujuannya : melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muliadi. 1998 hal.1). Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan bahwa “tujuan Lapas adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (masyarakat) setelah habis masa pidananya”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat mendidik narapidana selama berada di dalam tahanan sehingga mereka dapat melakukan perubahan positif dalam kehidupannya.

METODE PENELITIAN**3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian****3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis pendekatan yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai peristiwa atau masalah yang akan di teliti.

Metode penelitian kualitatif menurut Saryono (2010):

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Alasan digunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hendak menggambarkan Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli secara nyata. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kondisi atau keadaan suatu objek. Dengan menggunakan pendekatan ini data dapat diperoleh lebih lengkap untuk tercapainya tujuan dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah interaktif (saling berhubungan), dan partisipatoris (keikutsertaan) serta memahami cara hidup dari pandangan orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2013:04) mendefenisikan “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

3.2 Variabel Penelitian

⁷ Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Variabel independen atau disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana.
- ⁷ b. Variabel dependen atau disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ 3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah ³ di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang terletak di Jalan Dolok Martimbang No. 19 Desa Hilinaa, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ⁴ sebagai lokasi penelitian adalah:

- a. Jarak lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.
- b. Peneliti berkeyakinan bahwa ⁴ di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli layak untuk dilakukan penelitian dan tentunya akan menjawab permasalahan yang diteliti.

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kanchah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Teknik Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian yang diteliti adalah Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Gunungsitoli. Untuk observasi yang dilakukan peneliti adalah memperoleh data tersebut dengan cara pengamatan langsung.

b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan pokok permasalahan. Menurut Sugiyono (2016:317) “wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.”. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan secara mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan. Wawancara dalam penelitian ini tentunya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan.

c) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi di sini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.

Menurut Sugiyono (2016: 329):

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

⁶ Dokumen tersebut dapat berupa tulisan maupun gambar yang terkait dengan penelitian. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah rekaman, hasil gambar, dan catatan lapangan. Rekaman dengan menggunakan alat perekam, HP (merekam semua pembicaraan), hasil gambar sebagai bukti nyata, kemudian buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

Teknik pengumpulan data yang dimaksud bila digambarkan sebagai berikut:

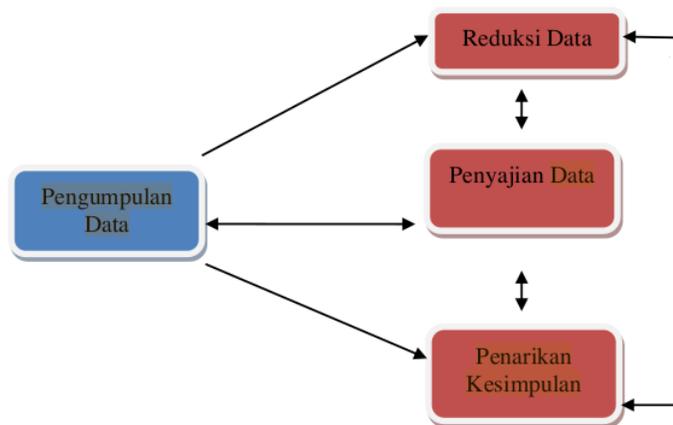


Gambar 1. Bagan Teknik Pengumpulan Data

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan analisis data hasil observasi awal atau data sekunder. Karena peneliti masih belum melakukan penelitian secara mendalam di lapangan. Jika nanti peneliti akan melakukan penelitian di lapangan maka akan digunakan analisis domain. Miles and Huberman (2016) mengemukakan bahwa “Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh”.

Adapun secara skematis empat tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Guna mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan observasi dan

wawancara terhadap beberapa informan.

2. **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan catatan lapangan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

3. **Penyajian Data**

Data dan informasi yang didapat di lapangan disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

4. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Lokasi dan Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota

Gunungsitoli

³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli awalnya bernama rumah penjara di bawah naungan Direktorat Jawatan Kepenjaraan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 1964 berubah nama dengan sebutan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Gunungsitoli, institusi ini awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun 1925, difungsikan sebagai penjara bagi masyarakat pribumi yang melakukan kejahatan atau perlawanan bagi pemerintahan kolonial belanda pada masa itu.

Lokasi Rutan Kelas II B Gunungsitoli berada di jalan Soekarno Kota Gunungsitoli, hingga pada tahun 1992 Rutan Kelas II B Gunungsitoli berpindah alamat ke Jalan Dolok Martimbang NO.19 Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli dan diresmikan ³ oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Utara Sofumbowo Larosa, S.H. Perubahan nomenklatur organisasi dari Rutan Kelas II B Gunungsitoli berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Kota Gunungsitoli pada tahun 2007 yang dipimpin ³ oleh Bapak Soetopo Barutu, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli saat ini berada di

Jalan Dolok Martimbang NO.19 Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli,
Sumatera Utara. Dengan luas 7.500 M2.

4.1.2 Visi dan Misi

Dalam upaya untuk mencapai pelayanan yang maksimal sehingga mampu untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas

4.1.3 Daftar Urut Jabatan/Kepangkatan Pegawai, Warga Binaan dan Sarana Prasarana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli Tahun 2023

Tabel I

NO	N A M A	N I P	J A B A T A N
01	EFFENDI YULIANTO ,Bc..I.P.,S.Sos.,S.H.,M.Si	196707211992031001	KALAPAS
02	BOROZATULO GEA, SH	19680719 1992031 001	KASUBBAG TU
03	FAJARIMAN LASE, SH	19681226 1990031 002	KA.KPLP
04	YOSUA ZEBUA, SE	19720406 1992031 002	Ka. Seksi Binadik dan Giatja
05	AFERELI ZILIWU, SH.	19660316 1989031 001	KA. ADM KAMTIB
06	KHAERUMAN PILIANG, S.H	19670409 1989031 002	Kaur Umum

07	LIESLIN MARUHAWA, S.Kep	19851107 2011012 001	K.Kepegawaian dan Keu.
08	ERMIN POLEM	197207211992031002	Kasubsidi Pelaporan
09	ZULMAN HULU	196912211994031001	Kasubsidi Keamanan
10	MANGENANO NAZARA	19671007 199003 1001	Kasubsidi Kegiatan Kerja
11	ILMAN KARYANUS ZEBUA, SKM	19800606 2014021 001	Kasubsidi Perawatan Napi/Tah
12	NATAL FISMAN ZEBUA, S.H	19911226 2012121 001	Kasubsidi Registrasi dan Giatja
13	Drg.JENNI RAJANI MANIK	19691210 200212 2003	Dokter Gigi Madya (JFT)
14	RITA HAREFA,SST	19710722199103 2 002	Perawat Penyelia (JFT)
15	IMELDA LAOWO,AMK	19850618 2008042 001	Perawat Penyelia (JFT)
16	KESAN RIA TELAUMBANUA,AMd	198405222010012026	Pengolah Data Kesehatan
17	BERTHA MUTIARA SARI ZEBUA, A.M.Keb	198904262011012005	Pengadministrasi Umum
18	ROTUA MASDIANA BANCIN, A.Md	197512081998032005	Perawat (JFT)
19	MARTILINA HAREFA	19660318 1993032 001	P.PEMBINAAN ROHANIAN
20	YULIUS HULU	196807061994031001	Anggota Jaga
21	ERLENTINA HAREFA,AMK	198606212009032010	Anggota Jaga
22	FEBRIANTI KRISTINA, SKM	19820227 200605 2 001	Anggota Jaga
23	TRIMARIANG HAREFA, AMKG	19870807 201001 2 038	P.Layanan Kunjungan

24	FERIAMAN HAREFA,A.M.K.L.,S.K.M	19810416 201101 1 003	KARUPAM
25	YUSLIAN HAREFA, SKM	19740506 200605 2 001	Bidan Pelaksana Lanjutan
26	RETNOWATI,A.Md	19800419 201001 2 0 21	P.PEMBINAAN KEROHANIAN
27	ASNARIA ZEGA	19660721199003 2 002	Bendahara Penerima
28	VITALIS DIAN LESTARI ZEBUA	19810802 20021 2 1 002	P. HASIL KERJA
29	HELMI SUPRIANDI TELAUMBANUA, S.H	19900813 200912 1 002	KARUPAM
30	AFOLO MENDROFA,AMK	19760907201001 1 011	KARUPAM
31	HERLY KURNIAWATI TELAUMBANUA	19840520 2008012 001	P.DATLAPORAN KEAMANAN
32	EMANUEL HAREFA	19800526 200701 1 001	KARUPAM
33	DERMAWAN HAREFA	19750824 200605 1 001	P. SARANA KERJA
34	MILATINA CASUARINA KUTTY	1990012 3 200912 2 002	Satuan Pengamanan/Tahanan
35	ABADI VIVIT PUTRA HAREFA	19960302 201712 1 003	Bendahara Pengeluaran
36	APELES AGUS SAPUTRA MENDROFA	19890828 201712 1 002	Penjaga Tahanan
37	VERTU KHARIS HARAPAN PUTRA ZEGA	19900224 201712 1 004	Penjaga Tahanan
38	SOLI SHARON TELAUMBANUA	19900501 201712 1 001	Penjaga Tahanan
39	SENIMAN JAYA TELAUMBANUA	19900916 201712 1 003	Penjaga Tahanan

40	MEI KARIANUS ZAI	19910517201712 1 004	Penjaga Tahanan
41	FOERAERA TELAUMBANUA	19911021 2017121 001	Penjaga Tahanan
42	EL SETIA ZENDRATO	19920428 201712 1 007	Pengadministrasi Keuangan
43	EKARISMAN HAREFA	19920620201712 1 002	Penjaga Tahanan
44	DARIUS SOWAA GEA	19930421 201712 1 002	Penjaga Tahanan
45	OKTORIS NAZARA	19931009 201712 1 011	Penjaga Tahanan
46	DIONISIUS PETRO HIA	19940513 201712 1 003	P.Layanan Kunjungan
47	SETIA HARAPAN HAREFA	19940731 201712 1 004	Penjaga Tahanan
48	IKHTIAR ZALUKHU	19950801 201712 1 004	Penjaga Tahanan
49	RISVAN NOTATEMA HAREFA	19951030 201712 1 005	P. Data Kegiatan Keamanan
50	AURELIA IDEAL ZEGA	19951024 201712 1 004	P. dan Pengelola Makanan
51	TEGUH JAYA TELAUMBANUA	19960509 201712 1 005	Pengadministrasi Umum
52	KHALIS INDRAWAN ZEBUA	19961205 201712 1 003	Pengolah Data Sidik Jari
53	HISKIA ZEGA	199612272017121005	P.Layanan Kunjungan
54	FERDINAN CARLOS ZENDRATO	19970816 201712 1 004	Penjaga Tahanan
55	ARIS ANUGERAH WARUWU	19970402 201712 1 001	Penjaga Tahanan

56	FANOI IMAN KRISTIAN TELAUMBANUA	19980205 201712 1 003	Penjaga Tahanan
57	KHASIAT IMAN AFORE HONDRO	19980416 201712 1 003	Penjaga Tahanan
58	STATESMAN ALFAGUNA HULU	199805212017121004	Penjaga Tahanan
59	ASJAN ANUGERAH ZAI	19970102 202012 1 001	Penjaga Tahanan
60	JOSES JOELI SAMAHEA LAWOLO	20001112 202012 1 001	Penjaga Tahanan
61	WASPADA ZAI	199607072022031001	Penjaga Tahanan
62	ADI RAHMAT IVOLALA GEA	200105312022031002	Penjaga Tahanan
63	ELEAZARO ZILIWU	200202272022031002	Penjaga Tahanan
64	JUANDI GEA	200206022022031001	Penjaga Tahanan
65	KRYE ELEISON SANOTONA ZEGA	200208072022031003	Penjaga Tahanan
66	IGA ENNOLERIAN LASE	200211042022032001	Penjaga Tahanan (Wanita)
67	PRISKA CINDY CAHYA NINGSIH GEA	200301092022032001	Penjaga Tahanan (Wanita)

KETERANGAN

REKAPITULASI GOLONGAN :

REKAPITULASI PENDIDIKAN :

		1. Strata-2	: 01 ORANG	
1. GOLONGAN :	IV	: 02 ORANG	2. Strata-1	: 13 ORANG
2. GOLONGAN :	III	: 29 ORANG	3. SLTA	: 46 ORANG
3. GOLONGAN :	II	: 36 ORANG	4. DIII	: 07 ORANG
4. GOLONGAN :	I	: - ORANG	5. SLTP	: - ORANG

9.	KLINIK	1
10.	POS JAGA	4
11.	BLOK BWP	4
12.	POS MENARA	4
13.	GEREJA	1
14.	MASJID	1
15.	AULA	1
16.	RUANGAN KETERAMPILAN	3

4.2 Hasil Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan. Adapun penerapan kebijakan pembinaan karakter kepada narapidana sebagai berikut:

1. Implementasi Pendidikan Karakter ⁹ Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Proses implementasi pendidikan karakter ¹ merupakan proses kebijakan yang penting. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak ada gunanya apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilakukan melalui 2 proses pembinaan pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y.Z (kepala seksi Binadik Dan Giatja) didapat data bahwa 2 proses pembinaan warga binaan, yaitu:

“Dari tahun ketahun lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli selalu memberikan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Proses pembinaan ini dilakukan dengan 2 proses, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini tertuju pada sifat dan perilaku warga binaan seperti karakter warga binaan, setiap saat kami selalu berusaha menanamkan karakter pada diri mereka di Lapas. Biasanya kami mengadopsi strategi tunggal dengan tujuan agar mereka dapat berubah dan berada di jalur yang benar.

Kemudian dalam proses pembinaan kemandirian ini, warga binaan dituntun untuk selalu mengerjakan kegiatan atau program apapun di lembaga pemasyarakatan, supaya mereka bisa mandiri dan selalu tidak bergantung pada sesama warga binaan. Kemudian mereka juga dilatih dan dituntun supaya selalu disiplin, baik itu disiplin waktu dan sebagainya. ” (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan Bapak Y.Z tentang pendidikan karakter yang dilakukan lembaga pemasyarakatan melalui proses pembinaan di dukung dengan pernyataan serupa oleh Bapak A.G, yaitu :

“Memang betul yang disampaikan oleh Bapak Y.Z, bahwa lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih menjalankan kebijakan atau kegiatan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan. Karena warga binaan yang masuk di lembaga pemasyarakatan ini memiliki kasus yang berbeda-beda, maka pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pendidikan karakter melalui 2 proses pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.” (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Dari pemaparan dua pendapat di atas memang benar adanya. Ini dapat dibuktikan pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Juli 2023 terdapat warga binaan yang sedang melakukan kegiatan seperti ibadah pagi, kegiatan kemandirian dan ada juga yang berolahraga. Tanggal 31 Juli 2023, peneliti mendapati petugas parkir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah seorang narapidana.

Pendidikan karakter melalui strategi pelatihan dan pembinaan merupakan salah satu metode untuk membentuk karakter tahanan. Dalam hal ini, pendidikan karakter diperlukan. Pendidikan karakter di Yayasan Remedial Kelas II B Kota Gunungsitoli tergambar dalam strategi pelatihan dan bimbingan belajar. Seperti yang dipahami oleh Pak Y.Z sebagai Kepala seksi BINADIK dan GIATJA, yaitu :

“Pembangunan karakter warga binaan menjadi tujuan seluruh kegiatan di sini. Di Lapas, kami selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan yang mereka terima. Biasanya kami melakukan pendekatan one-on-one agar mereka bisa berubah. dan bergerak ke arah yang benar. (Wawancara, Senin 31 Juli 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak A.G selaku petugas pemsayarakatan sebagai berikut:

“Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam mendukung terselenggaranya kebijakan pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk memperbaiki kepribadian mereka (narapidana). Karakter merupakan kepribadian pula. Sehingga pembinaan dan pembimbingan ini adalah bentuk pembelajaran dalam membentuk, membangun karakter dan kepribadian mereka. Kembali lagi pada apa tujuan yang hendak dicapai dari adanya pembinaan dan pembimbingan ini. Jadi harapan Lapas sendiri, narapidana dapat keluar dari tempat ini dengan kepribadian yang baru dan baik, jangan sampai malah tambah buruk”. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pendapat dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter diberikan kepada narapidana melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan digunakan sebagai sarana memperbaiki kepribadian narapidana dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri narapidana.

Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan dituangkan di dalam beberapa program kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Y.Z (kepala seksi BINADIK dan GIATJA), yaitu :

“Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan kami pihak lembaga pemasyarakatan memberlakukan beberapa kegiatan, seperti ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui pendidikan rohani, pendidikan agama, dan langkah-langkah yang kami laksanakan ini selalu menjalin kerjasama dengan kementerian agama, lembaga-lembaga gereja. dan ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang ada, seperti tersedianya rumah ibadah dan juga rohaniawan dan penyuluh keagamaan juga ada. Kemudian kegiatan lain adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, kami selalu memberikan pemahaman itu kepada warga binaan melalui upacara-upacara penaikan bendera yang dilaksanakan setiap hari senin dan juga pelaksanaan apel pagi. Kemudian ada juga kegiatan perubahan sikap dan perilaku, yaaa...kita selalu memberikan itu dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan tentang psikolog dan di dukung juga oleh adanya perpustakaan, dan pendidikan keagamaan. Dan juga ada kegiatan mengasah keterampilan warga binaan seperti ada kegiatan kerajinan tangan dan keterampilan lain. Sehingga harapan kami semoga warga binaan ini ketika selesai menjalani masa tahanan dan bisa kembali ke tengah masyarakatan dapat diterima kembali dan juga mendapat perubahan sikap dan perilaku, serta mempunyai keterampilan tersendiri.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut diatas juga di sama persis yang disampaikan oleh Bapak E.W (warga binaan), yaitu :

“Kami warga binaan yang ada disini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk kepribadian kami dan juga menyadari kesalahan yang telah menjerumuskan kami bisa masuk disini. Kami selalu melakukan kegiatan rohani, upacara, apel pagi dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya.”(Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dari kedua pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan dalam membentuk karakter dan kepribadian warga binaan, sehingga ketika warga binaan telah selesai menjalani masa tahanan maka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan memiliki

perubahan kepribadian dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Kemudian, kebijakan pembinaan dan pembinaan kepribadian serta pembinaan dan pembinaan kemandirian pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli dipisahkan. Kemajuan dan arah karakter dipisahkan menjadi tiga, yaitu pergantian peristiwa dan arah yang cerdas, fisik, dan dunia lain. Pergantian peristiwa dan arah otonomi dibedakan menjadi tiga, meliputi pergantian peristiwa dan arah kebebasan, persiapan dan latihan kerja. Dalam mengatur latihan ini, sipir penjara berupaya untuk mendorong nilai-nilai karakter yang berharga bagi para tahanan.

2. Kendala Yang Dihadapi Petugas Masyarakat Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Gunungsitoli.

“Kendala berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kendala dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami” (Badudun-Zain, 1994:489). Pada penelitian ini yang menjadi kendala dalam implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan adalah warga binaan itu sendiri dan sarana prasarana yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Y.Z (Kepala seksi BINADIK dan GIATJA) tentang kendala yang dialami oleh petugas masyarakat, yaitu:

“Yaaa... memang setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti ada hambatan ataupun kendala yang dialami, kegiatan apapun itu pasti ada. Nah, di lembaga masyarakat ini petugasnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui pembinaan dan pembimbingan mengalami kendala di lapangan, misalnya, karakter warga binaan. Mulai sebelum masuk di lembaga masyarakat, warga binaan ini mempunyai karakter yang bisa dikatakan buruk, jadi susah untuk diarahkan. Walaupun dilakukan pembinaan dan pendekatan sewaktu-waktu akan kembali lagi pada karakter tersebut. sehingga mau tidak mau petugas masyarakat tegas dalam hal melakukan pembinaan.

Kemudian kita juga disini tidak ada petugas yang

mempunyai basic untuk pendidikan karakter bagi warga binaan, yaa setidaknya kan petugas yang pendidikannya mempunyai keahlian dalam psikolog, karena masyarakat yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan ini berasal dari berbagai macam kasus tindak pidana, yaaa muda-mudah kedepan ada petugas yang ahli dalam hal tersebut. Kemudian kendala lain adalah ketidakterediaan ruangan yang khusus untuk pembinaan karakter warga binaan seperti ruangan konseling, apalagi sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.” (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan diatas juga di dukung oleh Bapak A.G (petugas pemasyarakatan), yaitu :

“Saya sebagai petugas pemasyarakatan yang setiap saat melaksanakan tugas sebagai pendidik warga binaan tentunya banyak dan bermacam-macam kendala yang saya hadapi, misalnya ketika ada warga binaan yang karakternya memang sudah buruk dari lingkungan masyarakat dia berada dan terbawa-bawa di lembaga pemasyarakatan. Saya sebagai petugas selalu mengarahkan dan memberikan pembinaan sesuai dengan program atau kegiatan dan bahkan melakukan pendekatan secara perorangan, tetapi sewaktu-waktu akan berulah lagi dan kembali lagi ke karakter awalnya. Kemudian kendala lain adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lengkap yang memang bisa digunakan oleh petugas dan bahkan warga binaan ketika melakukan aktivitas atau kegiatan dalam pendidikan karakter ini. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Dalam melakukan pendidikan karakter bagi warga binaan melalui pembimbingan dan pembinaan ini bukan hanya petugas pemasyarakatan yang mengalami hambatan ataupun kendala. Ada juga warga binaan yang memang mengakui ada kendala yang dialaminya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang searah dalam pendidikan karakter ini.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak E.W (warga binaan), yaitu :

“saya akui memang pendidikan karakter yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan kepada kami warga binaan sudah cukup baik, tetapi dibalik itu ada juga kelemahan yang dialami oleh petugas maupun warga binaan. Kadang saya malas dalam mengikuti kegiatan tersebut karena karena sarana dan prasarana yang kami gunakan kurang mendukung, kemudian kegiatan pendidikan karakter kurang stabil karena tidak ada tempat khusus untuk melakukan pembinaan

bagi warga binaan yang memiliki karakter yang bisa dikatakan buruk”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y.Z, Bapak A.G dan Bapak E.W(warga binaan), dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dari implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan melalui kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah karakter warga binaan dan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Spesialis penjara harus dapat menyelesaikan pelatihan dan pembinaan. Sejujurnya, latihan yang dikoordinasikan oleh penjara berbeda-beda dan beragam. Kegiatannya banyak, jadi butuh banyak perlengkapan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala berupa kurangnya alat untuk bekerja di lembaga pemasyarakatan.

Sehingga kegiatan yang dilakukan kurang stabil atau kurang berjalan dengan baik.

3. Upaya Yang Dilakukan Petugas Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Dengan berbagai macam kendala yang dialami, solusi dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang ada. Sebelumnya terdapat beberapa pemaparan mengenai kendala yang ada, selanjutnya ada beberapa solusi yang dipaparkan oleh Bapak Y.Z, yaitu:

”Tentu untuk melaksanakan kegiatan ini walaupun tadi berbagai kendalanya tentu ada juga upaya-upaya kami sebagai petugas pemasyarakatan. Warga binaan yang memiliki karakter yang susah untuk diarahakan tentunya kami melaksanakan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan. Yaaa... sehingga pendekatan secara persuasif ini atau komunikasi secara pribadi ini lebih kami tekankan kepada warga binaan sehingga mereka juga dapat menceritakan atau curhat dengan kami tentang apa yang dirasakan atau dialaminya, beban psikologi yang mereka hadapi dapat disampaikan kepada kami sehingga kami juga tahu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian tentang petugas pemasyarakatan yang ahli dalam psikolog atau yang

bisa mengetahui tentang karakter. Yaaaa... kami selalu menunggu semoga kedepan ini atau tahun ini ada petugas yang ditempatkan disini yang latar belakangnya memang ahli dalam psikolog. Kemudian untuk sarana dan prasarana, memang kami selalu mengajukan permohonan proposal kepada atasan untuk memberikan solusi yang baik dengan melengkapi sarana dan prasarana atau alat-alat yang digunakan oleh petugas dan warga binaan dalam melakukan kegiatan pembinaan ini, sehingga tidak ada lagi kendala. Jadi semoga tahun ini dapat dipenuhi dan diatasi apa saja yang menjadi hambatan tersebut.” (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

Pernyataan tersebut juga diatas di dukung penuh oleh Bapak A.G (Petugas Pemasarakatan), yaitu :

“Agar berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, petugas lapas akan memberikan Reward kepada para narapidana yang menaati segala bentuk aturan yang berlaku. Adapun bentuk dari Reward itu sendiri adalah cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Sedangkan untuk narapidana yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Adapun sanksi tersebut adalah tidak diusulkan memperoleh remisi, cuti dan bebas. Kemudian kami memberikan motivasi-motivasi yang dapat membangun hati nurani mereka dan memberikan pandangan yang baik kepada mereka, menjelaskan apa saja keuntungan yang akan di dapat dari menjalankan pembinaan ini. Kemudian melakukan pengajuan proposal untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang guna menambah peralatan yang kurang guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Memberikan motivasi melalui pendekatan individu kepada para narapidana”. (Wawancara Senin 31 Juli 2023).

¹ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Y.Z Bapak A.G, dapat diambil kesimpulan bahwa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan atau komunikasi secara perorangan agar apa yang dialami oleh warga binaan dapat diberikan solusi oleh petugas pemasarakatan. Kemudian pemberian hadiah berupa reward yang berwujud cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga. Seperti yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat dijadikan jembatan untuk bisa mendapatkan remisi maupun pembebasan. Dengan mensosialisasikan keuntungan

narapidana melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan maka narapidana akan tergugah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat proposal pengajuan penambahan barang ataupun sarana prasarana yang masih kurang.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli dan bagaimana solusi yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B kota gunungsitoli. Data yang dipaparkan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya akan dianalisis peneliti pada bab ini, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pihak terkait.

4.3.1 Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan tertua yang ada di Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan ini awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun 1925, yang dulu difungsikan sebagai penjara bagi masyarakat pribumi yang melakukan kejahatan dan perlawanan bagi pemerintahan kolonial belanda pada masa itu. Lembaga Pemasyarakatan berguna untuk memberikan perbaikan kepribadian dan moral narapidana.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peraturan pemerintah yang memuat tentang pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan tertera di dalam peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli termasuk salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan ini.

4.3.2 Implementasi Kebijakan

Prestasi atau kekecewaan dalam menjalankan suatu hal tidak ditentukan oleh banyak variabel. Van Metter dan Van Horn dalam Hasbullah (2015:97) mengungkapkan ada enam faktor dalam pelaksanaan pendekatan. Karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta karakter pelaksana, terdiri dari enam variabel berikut: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; kegiatan antar organisasi dan penguatan. Teori sebelumnya yang telah diteliti juga diperkuat dengan teori dari Van Metter dan Van Horn ini. Keenam variabel tersebut di atas dipenuhi oleh kebijakan pembinaan dan pendampingan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan terlampir:

1. Tujuan Kebijakan

Suatu Sebuah strategi yang dipikirkan secara positif memiliki tujuan yang ingin dicapai. Melalui pembekalan keterampilan hidup dan kerja, kebijakan pembinaan dan pendampingan yang ditujukan kepada warga binaan bertujuan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, strategi pembinaan dan pembinaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli juga bertujuan untuk meningkatkan warga tahanan dibandingkan sebelumnya dengan menanamkan budi pekerti dan budi pekerti yang baik. Setiap gerakan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengandung nilai-nilai karakter yang

bermanfaat bagi para tahanan. Kegiatan dan peraturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang bermanfaat dapat membantu mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya pendukung diperlukan untuk menerapkan kebijakan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, atau sarana dan prasarana pendukung merupakan contoh dari sumber daya tersebut. SDM yang diharapkan melakukan pendekatan pelatihan dan pengarahan di Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah sipir penjara, tahanan, BAPAS dan pihak luar. Keempat agen tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing mempunyai peran dan fungsinya masing-masing.

Aset selanjutnya adalah pondasi. Balai Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mempunyai kerangka meliputi tempat kasih sayang, koridor, lapangan, lobi, perpustakaan dan perangkat keras yang digunakan untuk peningkatan kebebasan penuh. Yang terakhir adalah sumber aset. Strategi pelatihan dan pembinaan pada Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memanfaatkan aset APBN (Rencana Keuangan Negara dan Pendapatan Konsumsi) dalam pelaksanaannya.

3. Komunikasi

Saat menerapkan kebijakan, komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting. Korespondensi diharapkan dapat memandu para spesialis pelaksana dalam melakukan pendekatan. Segala bentuk gerakan dan penggambaran kewajiban dasar dan unsur sipir penjara sebagai spesialis pelaksana dibantu melalui pertemuan. Petugas pemasyarakatan berbagi semua tanggung jawab secara merata. Pimpinan organisasi bertanggung jawab penuh terhadap segala jenis latihan yang ada di Yayasan Penyembuhan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

Masyarakat, pemilik usaha, dan instansi pemerintah semuanya dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan. Produk yang

dibuat oleh narapidana dapat dijual oleh pihak ketiga, dan narapidana dapat menghasilkan uang untuk dirinya sendiri.

4. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Strategi yang telah disusun secara positif memerlukan pengakuan dan dukungan dari para pionir. Inisiasi adalah gerakan penting dalam siklus pendekatan. Pendidikan karakter melalui strategi pelatihan dan pembinaan di Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak ada latihan inisiasi, karena latihan inisiasi dilakukan oleh pemerintah fokus.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Petugas Pemasarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bertugas menetapkan kebijakan pendidikan karakter melalui pembinaan dan pendampingan terhadap warga binaan. Pembina bagi warga binaan adalah petugas pemasarakatan. Selain berstatus manajer, seorang sipir penjara juga bisa berstatus penjaga gerbang restoratif. Kehidupan para tahanan selama berada di yayasan perbaikan diperiksa dan diarahkan oleh penjaga gerbang restoratif. Hal ini dinilai penting karena dengan hadirnya gatekeeper restoratif, karakter setiap tahanan dapat diubah secara lebih efektif, dengan menerapkan satu strategi. Seorang mentor dan manajer tidak memerlukan kemampuan skolastik seperti pembicara dan instruktur. Penjaga penjara membantu memberikan bimbingan kepada tahanan yang mengalami kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, sipir penjara juga bekerja sesuai kewajiban pokok dan kemampuannya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana

Petugas Penjaga Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli berjumlah 67 orang, semuanya mempunyai hubungan dengan pegawai pemerintah. Wali pemasarakatan memiliki tanggung jawab tambahan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, tidak ada tunjangan tambahan setelah ini. Kompensasi dan tunjangan diberikan berdasarkan jabatan dan kelas pegawai pemerintah. Semangat petugas pemasarakatan terhadap

pekerjaannya tidak akan berkurang jika gaji atau tunjangan mereka tidak dinaikkan. Penjaga penjara tetap bekerja sesuai kewajiban dan kemampuan utama mereka.

4.3.3 Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan penerapan pendidikan karakter melalui kebijakan pembinaan dan pendampingan adalah untuk meningkatkan moral warga binaan sebagaimana dibahas pada bab II. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, salah satu metode pendidikan karakter adalah dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada warga binaan. Kesuma Dharma dkk. (2011:9-10) menyatakan bahwa ada tiga tujuan pendidikan karakter, yang meliputi: berupaya memperkuat dan meningkatkan nilai-nilai, menyesuaikan perilaku yang tidak sesuai prinsip, dan membangun pergaulan yang bersahabat dengan keluarga dan masyarakat dalam melakukan tindakan. kewajiban mengenai pelatihan karakter bersama. Pembinaan karakter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilaksanakan melalui pembinaan dan bimbingan belajar. Tujuan dari strategi pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli seperti tiga sasaran sekolah karakter sesuai Kesuma Dharma. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan terlampir:

1) Memfasilitasi Penguatan dan Pengembangan Nilai-nilai

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan menjadi sarana untuk memberikan pendidikan karakter bagi warga binaan. Pendidikan karakter bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dilakukan dengan menekankan pada proses pembiasaan. Warga binaan melaksanakan pembinaan rohani seperti shalat dan sembayang di gereja setiap harinya. Selain pembinaan rohani, warga binaan melaksanakan pembinaan

kemandirian setiap hari. Warga binaan¹ menjadi lebih mandiri, disiplin, giat, kreatif dan religius melalui proses pembiasaan tersebut.

Dengan adanya proses pembiasaan yang dilakukan oleh warga binaan maka secara tidak langsung akan merubah pola hidup dan kepribadian setiap hari. Dengan melakukan kebiasaan yang baik maka warga binaan akan bertindak yang baik pula. Hal ini dapat dimaklumi karena aturan dan tata tertib yang mengikat. Sehingga warga binaan akan berperilaku yang baik.

2) Mengkoreksi Perilaku yang Tidak Sesuai dengan Aturan

Warga binaan yang tidak menaati aturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli¹ akan diberi hukuman oleh pihak lapas. Sanksi tersebut berupa tidak diusulkan memperoleh remisi dan cuti. Sanksi yang lain adalah warga binaan dimasukkan ke dalam selker.¹ Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku warga binaan yang menyimpang menjadi warga binaan yang baik. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan memberikan sanksi maka warga binaan akan bertindak sesuai dengan aturan dan mengubah perilaku narapidana. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada narapidana maka tujuan dari pemasyarakatan sendiri dapat tercapai.

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli¹ menggunakan pendekatan persuasif untuk

melakukan proses komunikasi. Petugas pemasyarakatan memberikan motivasi dan nasihat kepada warga binaan. Hal ini dirasa penting dilakukan karena masyarakat yang telah berstatus warga binaan tentu akan kehilangan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat. Suntikan semangat dan motivasi akan menumbuhkan rasa percaya diri warga binaan dan rasa dihargai kembali ke dalam diri narapidana. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga menegur narapidana yang melakukan kesalahan, seperti saat ada narapidana yang memanjat di atas kamar mandi, petugas pemasyarakatan menegur narapidana untuk segera turun.

- 1
- 3) Membangun Koneksi yang Harmoni dengan Keluarga dan Masyarakat dalam Memerankan Tanggung Jawab Pendidikan Karakter secara Bersama.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dari Kementerian Agama, gereja-gereja dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan. LKBH bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan rohani seperti pengajian rutin untuk warga binaan perempuan dan ibadah minggu untuk Non-Muslim. Sedangkan dinas pendidikan bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan intelektual yaitu kejar paket.

1 4.3.4 Metode Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter penting diberikan kepada warga binaan. Pendidikan

karakter dapat dilakukan melalui beberapa metode. Mulyasa (2013:9-10) berpendapat bahwa pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui kegiatan yang kondusif. Penciptaan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain adalah penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahan dan keteladanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sering mengadakan pelatihan kerajinan tangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan warga binaan. Selain pelatihan, petugas pemasarakatan juga mengarahkan dan menasehati warga binaan agar dapat bersikap dan berkepribadian baik.

Petugas pemasarakatan memberikan keteladanan kepada warga binaan berupa keikutsertaan petugas pemasarakatan melaksanakan pembimbingan kemandirian dalam membuat kerajinan tangan. Dengan adanya petugas pemasarakatan yang ikut bekerja, akan memunculkan semangat kerja bagi warga binaan. Pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi warga binaan tentu akan dilaksanakan oleh warga binaan setiap hari. Hal ini merupakan proses pembiasaan yang positif untuk warga binaan.

4.3.5 Subjek Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Agus Wibowo (2012:23) menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di pendidikan formal saja namun juga melalui pendidikan informal

dan non formal. pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan sekolah. Pendidikan karakter di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak hanya dilakukan oleh petugas pemasarakatan dan warga binaan. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang diajak bekerja sama dapat berupa lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, kementrian agama dan pendidikan.

Kejar paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasarakatan dengan pihak ketiga tentu akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama warga binaan. Warga binaan akan memperoleh pengalaman bekerja yang dapat dijadikan bekal hidup setelah keluar dari lembaga pemasarakatan. Selain itu, dengan adanya kegiatan yang dilakukan dengan pihak ketiga maka warga binaan dapat mengisi waktu keseharian warga binaan selama di lembaga pemasaraakatan dengan kegiatan yang bermanfaat.

4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Apabila kebijakan pembinaan dan pendampingan terhadap warga binaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan maka dapat dikatakan berhasil. Dampak yang diperoleh para tahanan dalam menjalankan strategi pelatihan dan pembinaan di Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak lepas dari kehadiran unsur pendukung. Dari hasil peninjauan yang telah selesai, terdapat tiga unsur pendukung untuk menjalankan strategi pengajaran dan pembinaan sebagai pelatihan karakter bagi para tahanan.

Kebijakan bimbingan dan bimbingan penjara yang wajib menjadi faktor pertama. Petunjuk lembaga pemasyarakatan wajib bagi narapidana yang telah diberi status narapidana. Dengan strategi wajib, para tahanan terbiasa melaksanakan pengaturan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tahanan melakukan pelatihan dan bimbingan belajar secara konsisten di lingkungan penjara. Hal ini sesuai dengan penilaian Mulyasa (2013:9-10) yang menyatakan bahwa pembiasaan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan karakter.

Unsur selanjutnya adalah tahanan yang mampu melaksanakan strategi pelatihan dan pembinaan akan diusulkan untuk mendapatkan cuti, baik cuti sebelum keluar, cuti kesempatan, cuti restriktif atau pengurangan. Berdasarkan temuan penelitian, petugas pemasyarakatan mendidik narapidana tentang hak dan tanggung jawab mereka selama berada di penjara pada tahap orientasi. Manfaat yang dapat diperoleh warga binaan jika mengikuti seluruh aturan dan ketentuan selama berada di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu hal yang sedang disosialisasikan. Warga binaan disarankan mendapat cuti dan remisi apabila mereka rutin mengikuti petunjuk dan peraturan.

Kebijakan pembinaan dan pendampingan juga bertujuan untuk memberdayakan warga binaan. Dengan melakukan pendekatan ini, para tahanan mempunyai keuntungan yang berbeda-beda, misalnya memiliki kemampuan baru, memperoleh wawasan kerja, memanfaatkan tenaga tahanan yang ada, memperluas otonomi tahanan, mengarahkan bakat dan kepentingan tahanan, dan tentu saja keuntungan dari mendapat pengurangan dan cuti. Dampak dari peninjauan ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2013: 18) yang menyatakan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara hati-hati kepada berbagai pihak agar pelatihan yang diberikan dapat dirasakan dan dilaksanakan dengan baik, karena sosialisasi merupakan sebuah langkah penting yang akan menjunjung tinggi dan menentukan kemajuan sekolah karakter. Unsur ketiga adalah pelaksanaan strategi pelatihan dan bimbingan bagi para tahanan di Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli yang bekerja sama dengan LKBH dan pihak administrasi sekolah serta dinas agama atau gereja. Konsekuensi dari eksplorasi ini sesuai dengan penilaian Agus Wibowo (2012:45) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan karakter dapat diwujudkan melalui proses

sosialisasi/mindfulness, penguatan, asimilasi dan kolaborasi seluruh elemen tanah air. Pendekatan yang metodis dan integratif terhadap pengembangan karakter melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, legislator, media, tempat kerja, dan sektor industri.

Pelaksanaan pendekatan pengajaran dan pembinaan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan. Tujuan kebijakan pembinaan dan pendampingan terhambat oleh faktor-faktor penghambat dalam kebijakan tersebut. Variabel penghambat dalam pelaksanaan strategi pengajaran dan pengajaran bagi para tahanan di Lapas Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah tidak adanya inspirasi para tahanan dalam melakukan pengajaran dan pengajaran.

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan pembinaan dan pendampingan terhambat karena masih terdapat warga binaan yang kurang memiliki motivasi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Tahanan yang tidak mempunyai inspirasi untuk melaksanakannya tidak dapat mencapai tujuan dari strategi yang sebenarnya. Selain kurangnya inspirasi, keterbatasan ruang juga menjadi kendala dalam melaksanakan strategi pengajaran dan bimbingan belajar.

Kantor dan yayasan merupakan bagian penting dalam memilah suatu gerakan. Mulyasa (2013:24) berpendapat bahwa pemanfaatan sarana dan sumber daya pembelajaran mempunyai arti penting, selain untuk melengkapi, memelihara dan meningkatkan khazanah pembelajaran, sumber daya pembelajaran juga dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan inovasi. Sejalan dengan itu, kantor dan kerangka kerja merupakan elemen penting. Namun jika dilihat dari kenyataan di lapangan, pelaksanaan arahan dan pengajaran pada Organisasi Restoratif Kelas II B Kota Gunungsitoli sebenarnya memerlukan sarana dan kerangka. Hal ini dapat dilihat dari ketidak seimbangan antara narapidana yang ikut menciptakan kebebasan kerja dengan peralatan dan kerangka yang ada serta ruangan atau bangunan yang khusus untuk pembinaan kepribadian para tahanan.

Ketiadaan kantor dan yayasan ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran Organisasi LAPAS Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli seharusnya mempunyai pilihan untuk memberikan bimbingan dan bimbingan, mengingat dalam melaksanakan penataan tersebut memerlukan

perangkat keras yang kurang sehingga dirasa kurang. Saat menerapkan suatu kebijakan, salah satu aspek terpentingnya adalah komponen anggaran atau biaya. Hal ini sejalan dengan penegasan Novan Ardy Wiyani (2012:49-50) yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan aspek krusial yang menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi atau lembaga. Bagian pendanaan menjunjung pelaksanaan proses instruksi orang.

4.5 Solusi dari Hambatan Implementasi Pendidikan Karakter

Setelah ada unsur-unsur penghambatnya, tentunya diperlukan jawaban bagi setiap komponen yang menekannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dalam hal ini telah mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas. Rencana yang dilakukan oleh Restorative Foundation adalah memberikan hibah kepada tahanan yang mematuhi semua prinsip dan menyelesaikan persiapan serta arahan. Hibah yang diberikan kepada tahanan mencakup permohonan cuti kontinjen, permohonan pengurangan, permohonan pembebasan bersyarat, izin bertemu keluarga, dan segala jenis cuti yang tersisa. Hibah ini diharapkan dapat membangun inspirasi para tahanan dalam melaksanakan pelatihan dan bimbingan belajar.

Dengan memberikan penghormatan, para tahanan akan bertindak sesuai pedoman dan pedoman yang berlaku dalam organisasi pemulihan. Para tahanan memanfaatkan ini sebagai hiburan untuk bekerja di yayasan restoratif. Namun, ketika penghargaan ini diberikan kepada narapidana, tentunya harus diteliti dan dipertimbangkan secara matang. Narapidana yang benar-benar pantas menerima penghargaan tersebut harus menerimanya.

Selain memberikan penghormatan, sipir penjara juga memberikan persetujuan pemasyarakatan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran. Para narapidana dihukum dengan tidak diberi cuti dan kunjungan keluarga. Selain itu, petugas pemasyarakatan menerapkan pendekatan individual untuk memotivasi narapidana. Pasalnya, individu yang pernah menjadi tahanan pasti akan kehilangan rasa takutnya ketika kembali terjun ke masyarakat. Jadi suntikan kegembiraan ini dianggap penting bagi para tahanan. Dengan memberikan suntikan semangat, para tahanan akan merasa bahwa seseorang sebenarnya sering memikirkan kondisinya yang tak ada habisnya ketika berada di landasan restoratif.

Hal ini sesuai dengan penilaian Mulyasa (2013:64-65) yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu memotivasi peserta didiknya, antara lain dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip. Siswa akan berusaha keras jika mereka tertarik dan fokus pada suatu tugas. jelas dan mudah dipahami, menghargai hasil kerja

dan prestasi siswa, serta penggunaan penghargaan dan hukuman yang efektif dan tepat.

Rencana terakhir yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah dengan memberikan usulan kepada Balai Peraturan Daerah dan Kemerdekaan Daerah Sumut untuk memperluas kewenangan dan kerangka kerja yang kurang. Kerangka kerja penting dalam melaksanakan strategi pendidikan dan pengarahannya karena tanpa adanya lembaga dan yayasan, kegiatan yang ada tidak dapat berjalan dan tujuan dari pelayanan restoratif itu sendiri tidak dapat tercapai. Dengan masih belum adanya kerangka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, maka penambahan kantor dan infrastruktur pendukung menjadi hal yang sangat penting. Mengingat jumlah penduduk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yang besar.

4.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

- a) Jangkauan rumah peneliti dengan tempat penelitian cukup memakan waktu banyak sehingga peneliti tidak selalu sering untuk datang ke tempat penelitian.
- b) Waktu penelitian yang dibatasi yaitu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Pendidikan Karakter bagi Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli

Pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli telah bekerja menuju tujuannya. Tujuan dari pendidikan ini adalah mengembalikan para narapidana ke daerah setempat dengan memberikan pengaturan hidup sebagai kemampuan kerja dan mengembangkan budi pekerti dan budi pekerti yang agung. Pelatihan ini diperlukan bagi para tahanan. Petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan pihak ketiga yang diajak berkolaborasi merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pendampingan. Persekolahan ini dilaksanakan melalui latihan jasmani, mendalam, ilmiah dan mandiri. Dalam setiap tindakan yang dilakukan para tahanan, tertanam nilai-nilai kemanusiaan yang agung dalam diri para tahanan. Nilai-nilai pribadi tersebut adalah sifat-sifat yang tegas, nilai-nilai keaslian, nilai-nilai kedisiplinan, sifat-sifat hidup yang kokoh, sifat-sifat yang bebas, nilai-nilai jiwa yang giat, nilai-nilai pantang menyerah, sifat-sifat penalaran yang imajinatif dan kreatif, dan nilai-nilai yang tegar. Strategi yang dilakukan sipir penjara dalam melakukan pelatihan dan pembinaan sebagai sekolah karakter adalah dengan menggunakan strategi individual, metodologi yang meyakinkan, model, persiapan, praktek langsung dan penyesuaian.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a)

warga binaan yang taat dan tertib; b) adanya pihak ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil produksi narapidana dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajian bagi muslim dan ibadah kristen rutin warga binaan; c) d) sifat kebijakan yang wajib diikuti oleh warga binaan.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli yaitu: a) motivasi warga binaan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.

3. Solusi dari Hambatan Implementasi pendidikan karakter

Solusi dari hambatan pelaksanaan pendidikan karakter bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli adalah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan adalah: a) memberikan kepada para warga binaan berupa pengusulan cuti mengunjung keluarga serta segala bentuk cuti lainnya. Selain pemberian *cuti*, warga binaan yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa perolehan hukuman selama enam hari kerja yaitu dimasukkan ke dalam Selker; b) memberikan motivasi kepada warga binaan, dan c) mengajukan proposal untuk penambahan sarana prasarana yang kurang ke Kantor Wilayah Hukum Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, saran yang diberikan peneliti adalah:

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di dalam bab 4, sebaiknya pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga lebih banyak lagi guna mendukung terselenggaranya pembinaan pendidikan karakter yang efektif dan efisien. Selain itu, lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pendidikan karakter secara rutin setiap minggu atau bulan, guna mengukur ketercapaian tujuan pemasarakatan.

2. Bagi Petugas Pemasarakatan

Melihat masih ada warga binaan yang kurang termotivasi melaksanakan pembinaan pendidikan karakter, maka pihak petugas pemasarakatan sebagai pembina, pembimbing dan wali pemasarakatan dapat lebih melakukan pendekatan dengan warga binaan guna memberikan dukungan dan motivasi secara persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Wibowo. (2012). *Pembinaan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Akhmad Muhaimin Azzet. (2011). *Urgensi Pembinaan Karakter di Indonesia: Revitalisasi pembinaan karakter terhadap keberhasilan belajar dan kemajuan bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dwidja Priyatno. (2006): *Sistem Pembinaan Pemasarakatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Masnur Muslich. (2014). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multi-dimensional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muchlas Samani dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah Thoha. (2008). *Manajemen Pembinaan dan Pengamplikasian*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta : Kencana.

B. Jurnal

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Pembimbingan*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembimbingan> pada 11 Juni 2017, pukul 10.05 WIB.

Fadjri Prathama. (2015). *Pelaksanaan Tindakan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Melanggar Peraturan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Diakses melalui www.journal.unitas-pdg.ac.id pada 19 Januari 2017, pukul 19.23 WIB.

Fitriyani Rohmawati. (2015). *Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan*. Diakses dari <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/771> pada 19 Januari 2017, pukul 19.06 WIB.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uny.ac.id Internet Source	14%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
3	www.lapasgunungsitoli.com Internet Source	2%
4	Submitted to University System of Georgia Student Paper	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uhamka.ac.id Internet Source	1%

layanan.ditjenpas.go.id

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On